

**UPAYA BERTAHAN HIDUP
PETANI TAK BERTANAH DI DESA BALECATUR
KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**NANANG RUMBOKO
NIM.07162311/ M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRACT

Population growth in Indonesia led to an increase in the necessities of life, especially food and shelter. Fulfillment of the needs of food grown with the increase in agricultural production, especially rice as a staple food of Indonesia's population. In an effort to meet the needs of the food is inseparable from the work done by people who have livelihoods as farmers. State of Indonesia has a wide area, but there is still inequality of land ownership. For farmers who do not have the capital, of course, does not have the ability to purchase or own land to cultivate so that small farmers and farm workers would still remain poor soil and do not have the assets to the ground. Livelihoods of landless peasants in the village of Balecatur, Gamping District, Sleman Regency interesting to know. The purpose of this study was to determine the effort made landless in an effort to survive, and what is expected by the landless in the village of Balecatur to the government in an effort to survive. In addition to knowing the role of the government to efforts to landless people in general.

The method used is a qualitative method. Research sites located in the Balecatur Village, Gamping District, of Sleman Regency. Primary data are taken from information sourced as a respondent farmers, village officials and officials of Sleman District Land Office and the Department of Agriculture. Secondary data from documents related to the landless. Data collection techniques is through interviews, document study and observation. Analysis of the data used is descriptive analysis.

In an effort to survive, landless people trying to make ends meet by working in addition to farming such as working as service workers, construction laborers, farm workers (hoeing, planting rice, plowing), working odd jobs, livestock, trade, and other businesses. Expectations of farmers who have no land to the government that is, the Government has consistently provided assistance tools and farming materials to farmers. Regular maintenance of irrigation channels by the government assisted the community (farmers). The government is expected to maintain stable prices of agricultural products and livestock prices. The government is expected to offset the cost of education and ease the cost of healthcare. The government is expected to provide employment to others in order to increase farmers' income due to conditions that do not have their own farmland. The role of the government against farmers who do not have soil that is by providing assistance to farmers in the form of agricultural production materials. In addition the government give consideration to maintain productive agricultural land that is not converted to non agricultural land. Government and related agencies are expected to play an active role in implementing the obligations of responsibility and develop the potential possessed by the farmers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan hidup terutama pangan dan papan. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan diusahakan dengan peningkatan produksi pertanian terutama beras sebagai makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Sudah merupakan hal yang umum bahwa mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian ternyata tidak selalu memberikan keuntungan dan bahkan kerugian yang didapat, misalnya saja seperti gagal panen, harga produksi hasil pertanian rendah.

Negara Indonesia mempunyai wilayah yang relatif luas, tetapi disamping itu masih terdapat ketimpangan kepemilikan tanah. Menurut Prof. Tjondronegoro kepemilikan tanah di Indonesia masih banyak terdapat ketimpangan antara orang kaya pemilik modal besar dengan orang miskin yang tidak memiliki modal secara finansial. Bagi petani yang tidak mempunyai modal, tentu saja tidak mempunyai kemampuan membeli atau memiliki tanah sendiri untuk diusahakan sehingga petani kecil dan buruh tani masih tetap miskin akan tanah dan tidak mempunyai aset terhadap tanah.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini menjelaskan bahwa tanah dan sumberdaya alam yang ada di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga tidak ada lagi warga negara yang miskin dan terlantar karena tidak memiliki tanah dan tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut. Akan tetapi tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada penduduk miskin diberbagai daerah di Indonesia.

Data kemiskinan dari BPS bulan Maret tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di pinggiran kota dan perdesaan dari pada di pusat kota. Kemiskinan tersebut disebabkan karena akses-akses sumber ekonomi di perdesaan lebih sedikit dibandingkan dengan di kota. Salah satu kota besar di Indonesia yang wilayahnya cukup padat adalah kota Yogyakarta. Wilayah pinggiran kota Yogyakarta berkembang dengan pesat terutama pembangunan rumah hunian. Dampak perkembangan kota tersebut berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan-lahan pertanian dan penghidupan masyarakatnya. Salah satu wilayah pinggiran kota Yogyakarta yang berada di bagian barat adalah Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman merupakan daerah pinggiran kota Yogyakarta yang dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian masih banyak terdapat di Desa Balecatur terutama di bagian utara, tetapi bagian selatan wilayahnya merupakan perbukitan yang tanahnya tidak semuanya cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Letak Desa Balecatur yang strategis menyebabkan sebagian lahan pertanian produktif di desa tersebut beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Dari data pra survey jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1.326 jiwa dan buruh berjumlah kurang lebih 3.200 jiwa dari jumlah total penduduk sebesar 18.699 jiwa. Jumlah petani yang tidak memiliki tanah diperkirakan berjumlah 150 jiwa. Letak Desa Balecatur yang berada di pinggiran Kota Yogyakarta dengan topografi yang bervariasi dan ketersediaan lahan-lahan pertanian beserta jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh yang relatif besar maka hal tersebut menarik untuk diteliti. Penghidupan masyarakat petani setempat khususnya buruh tani yang tidak memiliki lahan merupakan suatu alasan untuk melakukan penelitian mengenai **“Upaya Bertahan Hidup Petani tak Bertanah di Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada penulisan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan petani yang tak bertanah di Desa Balecatur dalam upaya bertahan hidup?
2. Apa yang diharapkan oleh petani tak bertanah di Desa Balecatur kepada pemerintah dalam upaya bertahan hidup?
3. Apa peran yang dilakukan pemerintah terhadap upaya petani tak bertanah di Desa Balecatur?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan oleh petani tak bertanah dalam bertahan hidup.
2. Untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh petani yang tak bertanah dalam upaya bertahan hidup.
3. Untuk mengetahui apa peran pemerintah terhadap petani tak bertanah terutama pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang pertanian yang berhubungan dengan program-program pertanian dalam memberikan akses kepada petani tak bertanah.

2. Sebagai masukan kepada instansi pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dalam memberikan jalan keluar dan berperan serta aktif untuk meningkatkan kesejahteraan petani tak bertanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam upaya bertahan hidup, petani yang tidak mempunyai tanah berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja selain bertani semampu mereka misalnya bekerja sebagai buruh jasa, buruh bangunan, buruh tani (mencangkul, tanam padi, membajak), bekerja serabutan, berternak, berdagang, dan usaha lainnya.
2. Harapan petani yang tidak mempunyai tanah kepada pemerintah yaitu:
 - a. Pemerintah secara konsisten memberikan bantuan alat dan bahan pertanian kepada petani.
 - b. Pemeliharaan saluran irigasi oleh pemerintah dibantu masyarakat (petani) secara berkala diharapkan akan menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
 - c. Pemerintah diharapkan menjaga kestabilan harga hasil pertanian dan harga ternak.
 - d. Pemerintah diharapkan meringankan biaya pendidikan agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan formal setinggi-tingginya dan meringankan biaya kesehatan.

- e. Pemerintah diharapkan menyediakan lapangan pekerjaan yang lain untuk dapat meningkatkan penghasilan karena kondisi petani yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri
3. Peran pemerintah terhadap petani yang tidak mempunyai tanah yaitu dengan memberikan bantuan kepada petani berupa bahan produksi pertanian seperti benih padi, pupuk, bantuan modal bertani, dan bantuan ternak. Peran pemerintah dalam hal lain yaitu pertimbangan untuk mempertahankan tanah pertanian produktif agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petani agar tidak menunggu bantuan pemerintah dan petani diharapkan dapat menciptakan inovasi dan peluang untuk meningkatkan usaha taninya.
2. Diharapkan agar petani dan pemerintah berinteraksi secara aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pertanian. Khususnya bagi pemerintah diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang usaha yang dapat meningkatkan penghasilan petani baik di bidang pertanian maupun di luar sektor pertanian.
3. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya maupun mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Petani sehingga petani bisa mandiri dalam usaha pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, Andi (2009) *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Kekal Press, Bogor.
- Arafat, Yudha (2009) *Kemiskinan dalam perspektif penggunaan tanah (studi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)*, Skripsi Program Diploma IV Pertanian Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhingan, M.L. (1975) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, CV RAJAWALI, Jakarta.
- Laporan Pertanggung jawaban Desa Balecatur tahun 2010
- Moleong, Lexy. (2009). *Metode penelitian Kualitatif*. Rosda, Bandung.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincoln (1987) *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE, Yogyakarta.
- Sangka, A.R. 2010. *Upaya Bertahan Hidup Sehubungan Dengan Keterbatasan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (studi di Desa Grabag Kecamatan grabag Kabupaten Purworejo)*. Skripsi Program Diploma IV Pertanian Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. (2010). *Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Yogyakarta.
- Setyobudi, Imam (2001) (www.googlebook.co.id : diunduh 16-01-2011 22:30). *Menari Diantara Sawah dan Kota: Ambiguitas Diri, Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta*; IndonesiaTera, Magelang.
- Tjondronegoro, M.P. Sediono (2008) *Negara Agraris Ingkari gararia: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia*, Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Widiyanto (2010). *Sistem Penghidupan Dan Nafkah Pedesaan*, (LPP) UNS, Surakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
- www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

www.googlebook.com

www.slemankab.go.id

www.kecamatanamping.blogspot.com